

## **IMPLEMENTASI PROGRAM PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI SMA NEGERI 6 YOGYAKARTA**

### **IMPLEMENTATION OF ANTI CORRUPTION EDUCATION PROGRAM IN SENIOR HIGH SCHOOL 6 YOGYAKARTA**

Oleh: Ayu Alfiyati, FSP/KP  
[ayualfiyati@gmail.com](mailto:ayualfiyati@gmail.com)

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendeskripsikan Implementasi Program Pendidikan Anti Korupsi (PAK), (2) Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Program PAK, (3) Mendeskripsikan Hasil dari Program PAK. Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Subyek penelitian adalah siswa, guru, dan kepala sekolah. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Implementasi PAK: (a) Dimulai tahun 2014 dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah nomor 188/210 dengan kebijakan di atasnya Instruksi Presiden nomor 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, (b) Sumber dana dari pemerintah, (c) Kegiatan penunjang: sosialisasi, pembuatan dokumen SOP, perlombaan kreatif, pengembangan media informasi, kantin kejujuran, (2) Faktor Pendukung: (a) Dukungan sarana prasarana (b) Partisipasi warga sekolah, (c) Adanya dana bantuan sosial. Faktor penghambat: (a) Kurangnya fasilitas buku tentang pendidikan anti korupsi (3) Hasil dari Program PAK ialah perkembangan perilaku siswa seperti kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggungjawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan.

Kata kunci : *Program Pendidikan Anti Korupsi, Pendidikan Anti Korupsi di SMA, Anti Korupsi*

#### **Abstract**

*This research aimed to: (1) Described the implementation of anti corruption education program in Senior High School 6 Yogyakarta, (2) Identified the supporting factors and inhibiting the implementation of anti-corruption education program. (3) Described the results of the implementation of anti corruption education program. This descriptive research is used qualitative approach. The research subjects are student, teachers, and the head of Senior High School 6 Yogyakarta. The data were collected by using observation, documentation, and interviews. Techniques used in data analysis are the display of data, data reduction, and making conclusions. Sources and technique triangulation is used to explain the validity of the data. The results of this research showed: (1) The implementation of anti corruption education program: (a) was held in 2014 on Headmaster Decree 188/210 with the President's Instruction number 5/2004 about Corruption Against, (b) The Source of funds was Education Board of Yogyakarta City, (c) Support Activities : Socialization, documented of Standard Operating Procedure (SOP), Creativity Games, Media and "Self-transaction Canteen" Development, (2) Supporting Factors: Supported Tools (b) Participation of School Community, (c) There was The Source of funds from Education Board of Yogyakarta City. Retarder Factors: (a) there was limited book about Anti Corruption Education in Senior High School 6 Yogyakarta (3) The Results of Anti Corruption Education Program are development of students behavior beside Honesty, Care, Independently, Discipline, Responsibility, Hard Work, Humble, Courage, Justice.*

*Key Word: Anti-corruption education program, Anti-corruption Education in Senior High School, Anti-Corruption.*

## PENDAHULUAN

Perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dari proses pelaksanaan pembangunan di segala bidang kehidupan. Seperti social, politik, ekonomi, keamanan, dan budaya yang telah membawa dampak negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat (Soejono dalam Suyitno, 2006:31). Kejahatan yang dimaksud ialah tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan tindak pidana yang harus dihentikan agar masyarakat dapat merasakan hidup tentram di negara yang bersih.

Korupsi di negeri ini telah memasuki seluruh bidang-bidang kehidupan sosial dan pemerintahan serta sudah sangat mengakar dalam budaya hidup, perilaku, dan cara berpikir. Jaringan korupsi telah terajut di seluruh sektor kehidupan, sejak dari istana hingga tingkat kelurahan bahkan RT/Rukun Tetangga (Nurul Irfan, 2011). Korupsi telah menjangkiti birokrasi dari atas hingga terbawah, lembaga perwakilan rakyat, lembaga militer, dunia usaha perbankan, KPU, organisasi kemasyarakatan, dunia pendidikan, lembaga keagamaan, bahkan lembaga-lembaga yang bertugas memberantas korupsi, seperti kepolisian, kehakiman, dan kejaksaan. Ibaratkan seperti penyakit kronis, kasus korupsi sangatlah sulit dituntaskan di Indonesia. Singkatnya korupsi telah membudaya di negeri ini bahkan telah menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut survey yang dilakukan oleh *Pacific Economic and Risk Consultancy* (PERC) sebagaimana dikutip oleh Komisi.

Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (2006) menunjukkan bahwa pada tahun 2005 Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara terkorup di Asia. Tahun 2011 menunjukkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia berada di peringkat 100 dari 183 negara. Kemudian pada tahun 2013, organisasi dunia, *transparency.org* merilis ada 10 negara terkorup di dunia. Dan dari 10 daftar negara itu, Indonesia berada di peringkat ke-5. Tentunya ini persoalan yang besar karena secara tidak langsung praktik korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat membuat kesenjangan perekonomian semakin menjadi, warga negara yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.

Kurang maksimalnya lembaga pemerintahan dalam menangani kasus korupsi maka pada tahun 2002 dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berpedoman pada UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, keberadaan KPK dibentuk karena lembaga pemerintah yang menangani perkara pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Kejahatan korupsi yang sulit dituntaskan membutuhkan solusi yang melibatkan

masyarakat luas.

Pemberantasan korupsi menurut KPK terbagi menjadi dua yaitu; tindakan represif dan preventif. Selain melalui mekanisme hukum (represif), juga membangun filosofi baru berupa penyemaian nalar dan nilai-nilai baru bebas korupsi melalui pendidikan formal. Hal ini sebagaimana dikutip dari Kemendiknas dalam Agus Wibowo (2012:17), bahwa pendidikan dianggap sebagai alternatif yang bersifat preventif. Itu karena pendidikan membangun generasi baru bangsa menjadi lebih baik. Keberhasilan penanggulangan korupsi tidak hanya bergantung pada penegakan hukum saja. Tindakan preventif ini dimaksudkan bahwa korupsi dapat dicegah secara dini dengan menguatkan pendidikan anti korupsi di sekolah-sekolah.

Hal inilah yang kemudian mendorong KPK untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi sedari dini kepada generasi penerus bangsa. Dalam Rencana Strategik KPK tahun 2008-2011 dipaparkan bahwa salah satu sasaran untuk bidang pencegahan adalah pembentukan budaya masyarakat anti korupsi, melalui pendidikan yang profesional baik sektor formal maupun informal secara bertahap. Generasi muda harus diberikan pendidikan yang mengedepankan akhlak agar tidak melakukan tindakan korupsi yang akan merugikan negara nantinya. Dengan keadaan zaman yang semakin modern dibutuhkan generasi yang mampu bersaing secara global dan mendukung Indonesia untuk menjadi

negara maju, karena terciptanya masyarakat yang maju dan mandiri dalam keadaan tentram dan sejahtera merupakan harapan dari suatu negara yang sedang berkembang.

Pendidikan di sekolah bertujuan untuk menyampaikan bahan ajar berupa *hardskill* dan kemampuan yang berupa *softskill* kepada peserta didik. Begitu pula seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Bab II Pasal 3 Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan: “Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab.” Berdasarkan Undang-Undang tersebut idealnya siswa dituntut watak yang bermartabat guna menjadi manusia yang sehat dan bersih dari korupsi.

Bangsa Indonesia kini telah menyadari pentingnya mengutamakan akhlak mulia dalam pendidikan. Hal itu tercermin pula dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional pasal 33 ayat 2 bahwa “kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat antara lain pendidikan agama”, termasuk di dalamnya

pendidikan moral seperti pengembangan sikap antikorupsi. Pendidikan agama ataupun pendidikan moral bertujuan untuk meningkatkan kualitas akhlak siswa. Individu yang lahir di dunia ini sudah memiliki kompetensi diri masing-masing, dan untuk mengembangkan potensi dirinya agar menjadi positif maka diperlukan peran pendidikan. Pendidikan akan membantu individu untuk menjadi orang yang berkahlak mulia, termasuk didalamnya perilaku antikorupsi.

Sejalan dengan hal di atas, salah satu upaya yang dilakukan untuk penanaman pola pikir, sikap, dan perilaku antikorupsi dapat dilakukan melalui sekolah karena sekolah adalah proses pembudayaan (Hassan dalam Mukodi, 2014). Sekolah sebagai lingkungan kedua bagi anak dapat menjadi tempat pembangunan karakter dan watak. Sekolah harus memberikan nuansa dan atmosfer yang mendukung upaya untuk menginternalisasikan nilai dan etika yang hendak ditanamkan, termasuk di dalamnya perilaku antikorupsi. Pendidikan Anti Korupsi dapat dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah, tetapi tidak terkotak-kotak ke dalam satu mata pelajaran, namun juga melalui pembiasaan. Pendidikan antikorupsi harus terintegrasi dalam berbagai mata pelajaran sehingga mampu mewarnai pola pikir, sikap, dan kebiasaan peserta didik.

Mengacu pada renstra diatas, SMA Negeri 6 Yogyakarta sebagai sekolah yang memiliki keunggulan riset dengan visi terwujudnya insan cerdas, unggul, dan peduli

lingkungan hidup turut menerapkan pendidikan antikorupsi (PAK). Dimulai pada tahun ajaran 2014/2015, SMA Negeri 6 Yogyakarta terpilih sebagai sekolah pelaksana Pendidikan Anti Korupsi. Tujuan PAK adalah menanamkan nilai dan sikap hidup antikorupsi kepada siswa, menumbuhkan kebiasaan perilaku antikorupsi, dan mengembangkan kreativitas siswa dalam memasyarakatkan dan membudayakan perilaku antikorupsi.

Diharapkan dengan adanya kebijakan sekolah ini akan mencetak generasi muda yang bersih dari korupsi karena telah diberikan wawasan sejak dini mengenai dampak adanya tindakan korupsi. Untuk itu peneliti ingin melaksanakan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan dan program apa saja yang ada pada kebijakan pendidikan anti korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta. Dengan begitu penelitian ini dirasa perlu dilakukan karena belum pernah dilakukan sebelumnya.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.

### **Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri

6 Yogyakarta pada bulan Desember 2016 - Februari 2017.

### **Informan**

Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah, guru, dan siswa di SMA Negeri 6 Yogyakarta

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, studi dokumentasi, dan wawancara.

### **Keabsahan Data**

Uji Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, triangulasi waktu, dan triangulasi teknik.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini diperoleh dengan langkah-langkah sebagai berikut: Reduksi data, Penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Menurut Miles dan Heberman dalam Sugiyono (2013:345) langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat dalam pengumpulan data berikutnya.

Dalam penelitian ini, setiap tahap kemudian diverifikasi, ketika peneliti menyimpulkan sesuatu hal maka akan di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten agar memperoleh kesimpulan yang obyektif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Implementasi Program Pendidikan Anti Korupsi.**

Implementasi Program Pendidikan Anti Korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta terbentuk pada Maret 2014. Program Pendidikan Anti Korupsi ini merupakan pengembangan dari program kantin kejujuran yang telah dibangun sejak tahun 2006. Memiliki kesamaan tujuan yakni untuk menanamkan nilai kejujuran kepada siswa maka antara program pendidikan anti korupsi dengan kantin kejujuran memiliki sinergi satu sama lain. Program PAK terbentuk pertama kali karena inisiatif Kepala Sekolah yang prihatin dengan keadaan Negara Indonesia dimana kasus korupsi semakin marak. Kemudian setelah melalui proses koordinasi dibentuklah tim pengelola program PAK yang disahkan dengan adanya Surat Keputusan Kepala Sekolah. Implementasi Program PAK tidak hanya mendapat dukungan partisipasi warga sekolah, namun juga mendapat dukungan dana bantuan social dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Banyaknya dukungan dari berbagai pihak kemudian terbentuklah Program Pendidikan Anti Korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta. Persiapan pelaksanaan Program Pendidikan Anti Korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta diawali oleh beberapa

tahapan, yakni:

- a. Pembentukan Organisasi (Tim Pelaksana) Bantuan Sosial Pendidikan Anti Korupsi (PAK) di SMA Negeri 6 Yogyakarta. Panitia ini terbentuk sejak pengajuan dana bantuan sosial PAK, yakni 3 Maret 2014 dan dikembangkan setelah dana bantuan tersebut diterima, yakni bulan Juli 2014
- b. Rapat persiapan dilakukan pada minggu kedua bulan Juli 2014 untuk menindaklanjuti dana bantuan yang sudah diterima. Dalam rapat ini dilakukan pembagian kerja sesuai dengan surat keputusan kepala sekolah tentang tim pelaksana PAK di SMA Negeri 6 Yogyakarta.
- c. Penyusunan program kegiatan dilakukan pada minggu kedua bulan Juli dan menghasilkan program-program yang lebih terperinci dan dikembangkan dari proposal kegiatan.
- d. Sosialisasi kegiatan Pendidikan Anti Korupsi diawali dengan informasi program PAK di sekolah dengan sasaran seluruh warga sekolah, yakni siswa, guru, dan karyawan.

Implementasi program pendidikan anti korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta memiliki beberapa kegiatan sebagai upaya pengembangan program tersebut. Kegiatan tersebut diantaranya ialah

- a. Sosialisasi,  
Sosialisasi terkait program pendidikan anti korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta bekerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dinas

Pendidikan Kota Yogyakarta. Kegiatan ini dilakukan dengan menyelenggarakan seminar atau workshop mengenai Pendidikan Anti Korupsi bagi warga sekolah. Kegiatan seminar ini melibatkan seluruh unsur penyelenggara pendidikan, meliputi tenaga pendidik (staf guru), tenaga kependidikan (Staf Tata Usaha), dan peserta didik. Nara sumber yang dihadirkan dalam seminar ini sangat kompeten dan ada keterlibatan langsung dengan Pendidikan Anti Korupsi, di antaranya adalah pejabat dari Kejaksaan Tinggi DIY dan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

- b. Pembuatan dokumen Standar Operasional Prosedur  
Standar operasional prosedur (SOP) ini disusun untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi dalam budaya sekolah. Manfaat adanya SOP sendiri bertujuan untuk mengatur dan memberikan pedoman untuk suatu penyelenggaraan pendidikan.
- c. Lomba-lomba kreatif,  
Kegiatan kreatif berupa lomba-lomba kreatif untuk mengembangkan pola pikir, kreativitas, dan nilai-nilai antikorupsi kepada peserta didik. Kegiatan ini meliputi adanya perlombaan pidato antikorupsi, lomba cerdas cermat anti korupsi, lomba video parody, dan penyebaran stiker.
- d. Pengembangan media informasi terkait

pendidikan anti korupsi di lingkungan sekolah,

Media informasi yang dikembangkan adalah *website* sekolah, pembuatan poster, dan stiker PAK. Keefektifan adanya media pengembangan di lingkungan sekolah berfungsi sebagai pengingat yang akan selalu dibaca siswa dan diharapkan akan diterapkan oleh siswa tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Media yang digunakan berupa *X-Banner* yang menarik, dan stiker.

e. Kantin kejujuran

Kantin kejujuran di SMA Negeri 6 Yogyakarta sudah berlangsung sejak tahun 2006. Kantin kejujuran utamanya guna membentuk watak siswa agar selalu berperilaku jujur. Pembiasaan ini memang harus diterapkan terus menerus dan berkelanjutan agar benar-benar diterapkan dalam diri siswa.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Program Pendidikan Anti Korupsi

a. Faktor Pendukung

Banyak faktor yang mempengaruhi dalam implementasi Program Pendidikan Anti Korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta, faktor-faktor tersebut diantaranya terbagi menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat. Secara ringkas faktor pendukung Implementasi Program Pendidikan Anti Korupsi ialah:

1) Adanya sarana dan prasarana yang mendukung keterlaksanaan program

pendidikan anti korupsi hingga saat ini. Sarana yang dimaksud ialah selain fasilitas sekolah sebagai sarana pembelajaran yang konvensional juga adanya kantin kejujuran dan buku penemuan barang untuk melatih kejujuran siswa. Selain itu adanya *x-banner* sebagai salah satu metode untuk seluruh warga sekolah untuk mengintrospeksi diri apakah sudah beprinsip dengan sikap antikorupsi ataukah belum. Sedangkan untuk prasarana, adanya sosialisasi memberikan wawasan kepada seluruh warga sekolah untuk memahami lebih dalam lagi mengenai seluk beluk tindakan korupsi.

2) Faktor pendukung dalam pelaksanaan Program Pendidikan Anti Korupsi diantaranya ialah adanya partisipasi dari seluruh warga sekolah. Kegiatan kreatif diantaranya seperti lomba video anti korupsi, lomba pidato anti korupsi, dan lomba cerdas cermat juga penyebaran stiker yang merupakan susunan kegiatan dari adanya program pendidikan anti korupsi telah diikuti oleh siswa, siswa merasa lebih semangat dalam menjalankan perlombaan tersebut karena dilakukan secara bersama-sama dan membuat keakraban antar siswa.

3) Kemudian adanya dana bantuan social dari Dinas Pendidikan Kota

Yogyakarta terkait program pendidikan anti korupsi. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, maka SMA Negeri 6 Yogyakarta berhasil melaksanakan program pendidikan anti korupsi sejak tahun 2014 hingga saat ini.

b. Faktor Penghambat

Selain adanya faktor pendukung dari program pendidikan anti korupsi, tentunya ada beberapa hal yang menjadi suatu penghambat untuk pelaksanaan Program Pendidikan Anti Korupsi. Secara ringkas, faktor penghambat implementasi program pendidikan anti korupsi ialah kurangnya buku-buku yang berkaitan atau yang membahas mengenai pendidikan anti korupsi. Dengan kurangnya fasilitas buku bacaan tentang pendidikan anti korupsi, siswa akan kesulitan memperdalam wawasannya mengenai pendidikan anti korupsi.

3. Hasil dari Program Pendidikan Anti Korupsi.

Nilai-nilai anti korupsi yang diterapkan dalam diri warga sekolah sebagai hasil dari adanya program pendidikan anti korupsi yakni:

a. Kejujuran.

Penanaman nilai kejujuran melalui beberapa hal, diantaranya adanya kantin kejujuran yang hingga sekarang masih berjalan. Kantin ini sudah berdiri sejak tahun 2006. Penanaman kejujuran berikutnya dengan adanya buku penemuan barang, dimana siswa yang menemukan segala jenis barang harus menuliskan di dalam buku yang sudah

tersedia di ruang wakil kepala sekolah urusan humas. Untuk selanjutnya dalam pembelajaran di kelas sebelum memulai suatu ujian, siswa diharuskan menulis kalimat “saya melakukan ujian dengan jujur”.

b. Kepedulian

Siswa di SMA Negeri 6 Yogyakarta memiliki 3 asas dalam hubungan social mereka, yakni “*solidarity, low profile, dan help each others*” semboyan itu sudah sering diterapkan sehingga hubungan alumni dan siswa semakin erat. Secara nyata, siswa peduli kepada temannya yang mendapat musibah dengan menyumbang sebagian uang jajannya untuk membantu temannya yang lain. Kemudian saling mengingatkan apabila salah seorang ingin berbuat curang, dan membantu guru yang membawa banyak barang tanpa harus diminta terlebih dahulu.

c. Kemandirian

Kondisi mandiri ialah dimana individu tidak bergantung kepada orang lain untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan karakter kemandirian tersebut siswa dituntut untuk mengerjakan semua tanggung jawab dengan usahanya sendiri dan bukan orang lain. Mandiri dalam mengerjakan tugas sekolah dan mandiri dalam mengerjakan ujian. Mandiri juga dengan tidak merepotkan orang lain.



d. Kedisiplinan

Kedisiplinan siswa sudah diatur dalam tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah yang di dalamnya mencakup tentang pemakaian seragam, waktu belajar siswa, dan perilaku siswa. Untuk siswa yang membawa kendaraan ke sekolah, ia harus menuntunnya saat sudah memasuki gerbang, kendaraan dituntun hingga memasuki parkir. Jika siswa tidak disiplin maka akan mendapatkan sanksi berupa point. Kemudian sanksi tersebut akan dilanjutkan dengan pemanggilan orangtua. Untuk itu siswa harus disiplin dan menaati peraturan. Selain untuk siswa kedisiplinan juga untuk guru.

e. Tanggung Jawab

Siswa akan senantiasa bertanggungjawab saat ia melaksanakan suatu event atau kegiatan, maka ketika ia memulainya ia juga harus bertanggungjawab penuh sampai akhir. Berani menerima konsekuensi atas tindakan yang dilakukan. Misalnya dipilih menjadi bendahara kelas ya yang benar dalam mengelola uang kelas. Ketua kelas ya memimpin kelas yang benar. Ada informasi dari guru disampaikan. Entah itu tugas, jam kosong, ulangan, siswa dituntut untuk menjalankan amanah dengan baik. Guru juga bertanggungjawab atas siswanya, ia akan membantu siswanya yang sedang bermasalah sehingga tercipta kenyamanan anak berada di sekolah.

f. Kerja Keras

Siswa belajar untuk mau berusaha dengan

cara baik/ halal untuk meraih sesuatu. Menabung untuk berangkat *studytour*, belajar agar dapat mengerjakan tugas dan ulangan, serius menggeluti hobi dengan media ekstrakurikuler di sekolah untuk melatih kemampuan dan bakat siswa

g. Sederhana

Gaya hidup sederhana sebaiknya perlu dikembangkan sejak seseorang mengenyam masa pendidikannya. Berpenampilan sederhana saat di sekolah hal ini sudah di atur dalam tata tertib SMA Negeri 6 Yogyakarta. Hal ini bermanfaat untuk siswa agar membeli apa yang diperlukan dan diinginkan secukupnya.

h. Keberanian

Nilai keberanian antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran, berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan lain sebagainya

i. Keadilan

Bagi siswa karakter adil ini perlu sekali dibina sejak masa pendidikannya agar siswa dapat belajar mempertimbangkan dan mengambil keputusan secara adil dan benar. Siswa di SMA Negeri 6 Yogyakarta sebenarnya terdiri dari siswa yang berasal dari beragam golongan, namun diantara siswanya tidak ada perbedaan status. Para siswa cenderung berlaku sama kepada semua.

## PEMBAHASAN

Peneliti menggunakan teori model Implementasi Van Meter dan Van Horn dalam memberikan analisis yang terbagi menjadi enam komponen yang mendukung keberhasilan suatu implementasi kebijakan yaitu:

### a. Standar dan Tujuan Kebijakan

Implementasi PAK di SMA Negeri 6 Yogyakarta dilakukan melalui pembelajaran intrakurikuler yang terintegrasi dalam mata pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, dan pembiasaan/ pembudayaan nilai-nilai antikorupsi di sekolah. Budaya riset yang ditanamkan pada diri siswa secara tidak langsung merupakan upaya membangun pola pikir kritis, objektif, jujur, bertanggung jawab, dan transparan. Pola pikir tersebut merupakan cara-cara efektif pendidikan antikorupsi didukung dengan program-program lain yang dikemas dalam PAK. Dengan demikian, tujuan PAK di SMA Negeri 6 Yogyakarta dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Menanamkan nilai-nilai antikorupsi pada siswa sejak dini
- 2) Membiasakan perilaku hidup yang mencerminkan nilai-nilai antikorupsi
- 3) Meningkatkan kepedulian siswa dan warga sekolah lainnya mengenai nasib bangsa, khususnya terkait dengan dampak perbuatan para koruptor
- 4) Meningkatkan kreativitas dan aktivitas siswa dalam belajar

### b. Sumberdaya

Implementasi Program Pendidikan Anti Korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta mendayagunakan sumber daya manusia yang terdiri dari seluruh warga sekolah, dimulai dari teneaga pendidik, tenaga kependidikan, dan siswa. Tenaga pendidik yang dimaksud yakni guru, dan tenaga kependidikan di SMA Negeri 6 Yogyakarta meliputi tenaga pengelola satuan pendidikan, tenaga perpustakaan, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, tenaga kebersihan, dan keamanan sekolah. Untuk pembagian tugas dalam implementasi program pendidikan anti korupsi telah diatur dalam Surat Keputusan Kepala Sekolah Nomor 188/210 tentang Penetapan Tim Pengelola Pendidikan Anti Korupsi SMA Negeri 6 Yogyakarta tahun Ajaran 2014/2015. Sumberdaya tersebut mendukung pelaksanaan Program Pendidikan Anti Korupsi yang telah diberlakukan sejak tahun 2014. Selain sumberdaya manusia, juga dibutuhkan sumberdaya nonmanusia. Sumberdaya nonmanusia dapat dilihat dari adanya fasilitas, dan sarana parasarana pendukung kegiatan belajar dan mengajar. Untuk kelengkapan sarana dan prasarana telah mendukung dalam pelaksanaan program ini, sarana yang utama dan menjadi pelopor pengembangan program PAK ialah kantin kejujuran, dan x-banner yang dipasang di lorong sekolah. Sementara untuk penanaman nilai-nilai lainnya yang

termasuk dalam prinsip antikorupsi telah didukung oleh sarana belajar mengajar konvensional biasa.

c. Karakteristik Agen Pelaksana

Implementasi Program Pendidikan Anti Korupsi didukung dengan adanya struktur organisasi yang telah disahkan dalam surat keputusan kepala sekolah, terdiri dari guru dan tenaga kependidikan atau karyawan. Kepala sekolah berperan sebagai penanggung jawab program, dan Wakil Kepala Sekolah Urusan Humas sebagai Ketua Program Pendidikan Anti Korupsi, selanjutnya terdiri dari 28 orang guru-guru sebagai penanggungjawab dalam setiap kegiatan yang tersusun dalam Program Pendidikan Anti Korupsi. Dan pembinaan secara terus menerus diberikan kepada seluruh personil sekolah juga siswa agar tercapainya keberhasilan program pendidikan anti korupsi.

d. Komunikasi

Implementasi program pendidikan anti korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta telah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, yakni pemerintah, warga sekolah, orangtua dan masyarakat sekitar sekolah. Komunikasi yang terjalin diawali dengan adanya sosialisasi mengenai pendidikan anti korupsi. Sosialisasi terkait program pendidikan anti korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta bekerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

e. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Kondisi sosialnya telah mendukung penuh keberlangsungan program PAK. Hal ini terbukti

dari adanya partisipasi aktif dari seluruh warga sekolah, baik siswa, guru, dan karyawan. Siswa mengikuti kegiatan kreatif yang telah disusun. Pengembangan media informasi juga disediakan oleh SMA Negeri 6 Yogyakarta dengan memfasilitasi kantin kejujuran, buku agenda penemuan barang, dan x-banner sebagai pengingat diri. Guru sebagai panutan siswa di sekolah telah memberikan tauladan kepada para siswa, dan secara terus menerus membina siswa agar berhasil untuk menginternalisasikan nilai-nilai antikorupsi kedalam diri siswa. Dari segi ekonomi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dengan memberikan dana bantuan social bagi sekolah penyelenggara program pendidikan anti korupsi. Dan berdasarkan segi politik, memerangi korupsi merupakan tujuan setiap bangsa untuk menciptakan negara yang bersih dari korupsi.

f. Interorganisasi dan Aktivitas

Terdapat tiga macam respon yang terdapat dalam aktivitas pelaksana kebijakan. Respon tersebut mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan yang diberlakukan. Ketiga respon atau aktivitas tersebut diantaranya ialah:

- 1) Pengetahuan, pemahaman, dan pendalaman
- 2) Arah respon apakah negative, netral, atau menolak
- 3) Intensitas terhadap kebijakan tersebut.

Implementasi program pendidikan anti korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta menunjukkan sikap yang didukung oleh seluruh warga sekolah. Setelah diberikannya sosialisasi, warga sekolah terutama siswa berpartisipasi dalam kegiatan kreatif sebagai salah satu program pendidikan anti korupsi. Kemudian seluruh respon dari warga sekolah juga tidak menolak adanya program pendidikan anti korupsi, karena permasalahan korupsi yang merupakan kejahatan harus dibersihkan untuk itu pelaksana program telah memahami pentingnya program pendidikan anti korupsi untuk diterapkan.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan, serta temuan penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Program Pendidikan Anti Korupsi, (1) Program pendidikan anti korupsi dilaksanakan sejak Maret tahun 2014, (2) Sumber dana pelaksanaan program pendidikan anti korupsi ialah dari dana bantuan social Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta setelah sebelumnya pihak sekolah mengajukan proposal, (3) Struktur Organisasi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Sekolah Nomor 188/210 Tentang Penetapan Tim Pengelola Pendidikan Anti Korupsi SMA Negeri 6 Yogyakarta Tahun Ajaran 2014/2015, (4) Persiapan dalam program pendidikan anti

korupsi ialah pembentukan struktur organisasi, rapat persiapan untuk menindaklanjuti dana bantuan yang sudah diterima dan dilakukan pembagian kerja sesuai dengan surat keputusan kepala sekolah tentang tim pelaksana PAK di SMA Negeri 6 Yogyakarta, kemudian penyusunan program yang menghasilkan program-program terperinci dari proposal kegiatan, dan terakhir ialah sosialisasi, (5) Kegiatan penunjang program pendidikan anti korupsi ialah sosialisasi, pembuatan dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP), lomba-lomba kreatif, pengembangan media informasi terkait pendidikan anti korupsi di lingkungan sekolah, dan adanya kantin kejujuran.

2. Faktor Pendukung dalam Program Pendidikan Anti Korupsi ialah *Pertama*, adanya sarana dan prasarana yang mendukung keterlaksanaan program pendidikan anti korupsi. *Kedua*, adanya partisipasi dari seluruh warga sekolah. *Ketiga*, adanya dana bantuan social. Sedangkan faktor penghambat implementasi program pendidikan anti korupsi ialah kurangnya buku-buku yang berkaitan atau yang membahas mengenai pendidikan anti korupsi. Dengan kurangnya fasilitas buku bacaan tentang pendidikan anti korupsi, siswa akan kesulitan memperdalam wawasannya mengenai pendidikan anti korupsi.

3. Hasil adanya program pendidikan antikorupsi yang diterapkan di SMA Negeri 6 Yogyakarta ialah perkembangan perilaku siswa yang tercermin dalam nilai yang bersifat karakter seperti kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggungjawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Nilai tersebut telah ditanamkan secara berkelanjutan kedalam diri seluruh warga sekolah melalui berbagai kegiatan penunjang dari program pendidikan anti korupsi dan tata tertib sekolah.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan masukan atau saran antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta sebagai pengambil kebijakan sebaiknya Program Pendidikan Anti Korupsi dapat dilaksanakan oleh seluruh sekolah, mengingat program ini sebagai upaya preventif dan bermanfaat untuk menciptakan generasi yang bersih dari tindakan korupsi.
2. Bagi Sekolah, hendaknya secara mandiri dapat memberikan pembinaan yang berkelanjutan, efektif, dan efisien kepada warga sekolah agar menjadi proses pembiasaan, serta dapat mengembangkan sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
3. Bagi Kepala Sekolah, diharapkan agar lebih intensif dalam mengontrol keberlanjutan Program Anti Korupsi, dan

membuat kegiatan penunjang yang mendukung pelaksanaan program tersebut seperti menyediakan buku-buku tentang pendidikan anti korupsi di perpustakaan sehingga warga sekolah khususnya siswa dapat memperluas wawasannya, dan menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lainnya

4. Bagi Karyawan, diharapkan agar lebih aktif mencari relasi untuk bekerjasama dalam mengembangkan program pendidikan anti korupsi sehingga program dapat terus dilaksanakan.
5. Bagi Guru, diharapkan dapat memberikan tauladan dan melakukan pembinaan kepada siswa, sehingga siswa dapat menginternalisasikan kebermanfaatan program pendidikan anti korupsi dalam diri mereka.
6. Bagi Siswa, hendaknya turut serta dan ikut mensukseskan program pendidikan anti korupsi. Selain itu juga hendaknya siswa selalu menerapkan perilaku yang sesuai dengan norma dan aturan di sekolah dan di masyarakat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agus Wibowo. (2012). *Pendidikan Karakter: Strategi Membangun Karakter Bangsa Berperadaban*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. (2007). Pusat Badan Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kemendikbud. (2011). Pendidikan Arti

Korupsi. Diakses melalui <http://www.kpk.go.id/id/faq> pada Hari 26 April 2016 Pukul 13:22 WIB

Mukodi dan Afid Burhanuddin. (2014). *Pendidikan Anti Korupsi: Rekonstruksi Interpretatif dan Aplikatif di Sekolah*. Yogyakarta: Aura Pustaka.

Nurul Irfan. (2011). *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah.

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Fungsi Pendidikan.